

# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN ANGGARAN 2023



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNGPABAR  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 memuat Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan dimasa mendatang.

Kuala Tungkal, *22 Januari* 2024

KEPALA BAPENDA



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi.....	4
1.5. Sistematika Penyajian.....	10
<b>Bab II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	11
2.2. Perjanjian Kinerja.....	13
<b>Bab III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Bapenda .....	14
B. Realisasi Anggaran .....	50
<b>Bab IV PENUTUP.....</b>	<b>52</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di tetapkan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 memuat Hasil Pengukuran Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan salah satu unsur pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Isu – isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola objek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah

2. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut pajak daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah
3. Memenuhi fasilitas dan meningkatkan pelayanan pemungutan pajak daerah
4. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
5. Meningkatkan kualitas data base dalam pengelolaan potensi pajak daerah
6. Meningkatkan kerjasama pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.



5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Negara baik di tingkat Pusat maupun di daerah yang berisikan tentang Informasi Keberhasilan maupun Kegagalan melaksanakan Misi Kepala Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah**

#### **1. Kedudukan dan Tugas Pokok**

Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Memperhatikan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 800/8759/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Persetujuan Jabatan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Provinsi Jambi melakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

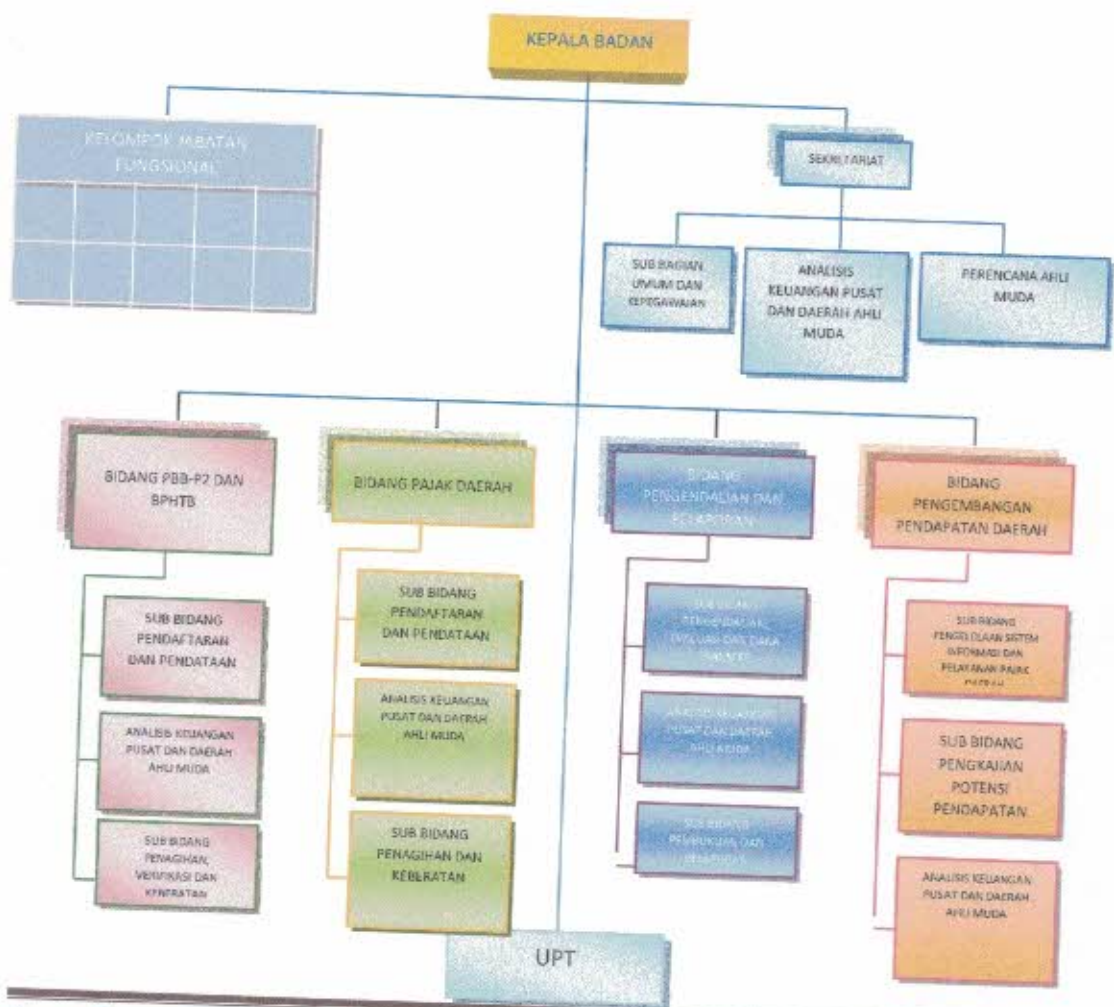
#### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;

- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah





Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
  1. Sub bagian Umum Kepegawaian
  2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  3. Perencana Ahli Muda
- b. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :
  1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
  2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  3. Sub bidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
  1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
  2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan
- d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas :
  1. Sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer
  2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  3. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
- e. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  1. Sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah
  2. Sub bidang Pengkajian Potensi Pendapatan
  3. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

#### **4. Sumber Daya Aparatur**

Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sejumlah 129 orang yang terdiri dari 46 orang PNS, dan 83 orang tenaga kerja kontrak (TKK) yang di distributorkan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Bidang	PNS	CPNS	TKK/TKS	Jumlah
1.	Sekretariat	11 Orang	-	33 Orang	44 Orang
2.	Pajak Daerah	8 Orang	-	15 Orang	23 Orang
3.	PBB-P2 dan BPHTB	13 Orang	-	17 Orang	30 Orang
4.	Pengendalian dan Pelaporan	7 Orang	-	9 Orang	16 Orang
5.	Pengembangan Pendapatan Daerah	7 Orang	-	9 Orang	16 Orang
Jumlah		46 Orang	-	83 Orang	129 Orang

### Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sarana kerja yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah adalah :

URAIAN	BANYAKNYA
<b>KOMPUTER</b>	
- Mini Komputer	1
- PC Unit	28
- Laptop	12
- Tablet /Gadget	5
- Personal Komputer Lainnya	5
- Peralatan MainFrame Lainnya	3
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	32
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4
- Harddisk Internal/External	6
- Server	4
- Router	1
- Hub	-
- Peralatan Jaringan lainnya	-
<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	
- Peralatan Olah Raga Lainnya (dst)	1
<b>ALAT ANGKUTAN</b>	
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah )	5
- Pick Up	1
- Sepeda Motor	36
<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	



- Global Positioning System (GPS)	2
- Alat Pengukur Garis Tengah	3
- Alat ukur lain-lain lainnya	1
<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	
- Mesin Hitung Liskrik	1
- Mesin Kas Register	1
- Lemari Besi Metal	6
- Billboard	13
- Rak Besi	2
- Filing Cabinet Basi	1
- Brandkas	2
- Lemari Kaca	1
- CCTV (Camera Control Television System)	1
- Papan Visual/Papan Nama	5
- Alat Penghancur Kertas	5
- Mesin Absensi	1
- Papan Nama Instansi	1
- Papan Pengumuman	-
- Papan Tulis	2
- Teralis	1
- Alat Kantor Lainnya	1
- Meja Kerja Kayu/Rotan	3
- Kursi Besi dan Metal	4
- Meja Rapat	4
- Meja Panjang	2
- Meja ½ Biro	3
- Kursi Fiber Glas/Plastik	1
- Kursi Tamu	6
- Meja Komputer	6
- Alat Pembersih lainnya	1
- Lemari Es	1
- AC Split	16
- Kipas Angin	1
- Televisi	3
- Sound System	3
- Unit Power Supply	13
- Stabilisator	6

- Camera film	-
- Alat Hiasan	3
- Tangga Aluminium	1
- Mimbar/Podium	1
- Hardy Cam	1
- Gorden	2
- Karpet	1
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	-
- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	4
- Lemari Arsip	10
<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKAST DAN PEMANCAR</b>	
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	
- Digital LED Running Text	3
- Layar Film/Projector	3
- Camera Digital	3
- Mesin Cetak Listrik Sheet	2
- Mesin Cetak Elektronik	1
- Facsimile	1
- Genset	1



## 5. Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 pada APBDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam DPA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	Pendapatan (PAD)	Rp. 32.449.222.773
2	Belanja	Rp. 11.804.576.801
	- Belanja Operasional	Rp. 11.685.941.601
	- Belanja Modal	Rp. 118.635.200

### 1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

**Bab I**   Pendahuluan

**Bab II**   Perencanaan Kinerja

**Bab III**   Akuntabilitas Kinerja

    A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

    B. Realisasi Anggaran

**Bab IV**   Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS).**

Visi tersebut diimplementasikan kedalam 5 misi, yaitu:

- Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahklak.
- Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
- Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- Misi 4 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- Misi5 : Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai kota

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi langsung



dalam mendukung pencapaian Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dengan Indikator Utama “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah”.

**PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 s/d TAHUN 2026  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Urutan	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,247,791,849,420.00</b>	<b>1,150,000,000,000.00</b>	<b>1,199,800,001,000.00</b>	<b>1,243,840,001,500.00</b>	<b>1,299,812,900,000.00</b>	<b>1,364,800,440,500.00</b>
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>120,000,000,000.00</b>	<b>98,135,351,000.00</b>	<b>101,660,000,000.00</b>	<b>111,945,600,000.00</b>	<b>123,482,215,500.00</b>	<b>136,480,344,500.00</b>
1	Pajak Daerah	36,596,319,800.00	36,304,197,500.00	38,122,500,000.00	41,979,600,000.00	45,890,419,500.00	49,815,325,500.00
2	Retribusi Daerah	3,175,100,000.00	2,295,179,000.00	3,558,100,000.00	5,597,280,000.00	7,408,933,000.00	9,553,624,500.00
3	Hasil Pengalangan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,238,139,900.00	11,228,000,000.00	12,707,500,000.00	13,993,200,000.00	15,435,277,000.00	17,080,043,000.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	68,990,440,800.00	46,309,983,500.00	47,271,900,000.00	50,375,520,000.00	54,949,588,000.00	60,051,351,500.00
<b>II</b>	<b>Dana Transfer</b>	<b>1,088,436,640,420.00</b>	<b>1,010,030,349,000.00</b>	<b>1,052,342,562,500.00</b>	<b>1,083,807,091,000.00</b>	<b>1,125,838,908,500.00</b>	<b>1,175,306,836,500.00</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	244,465,259,000.00	244,518,751,000.00	251,854,313,500.00	259,409,943,000.00	269,796,341,000.00	281,926,726,000.00
2	Dana Alokasi Umum	495,245,924,000.00	479,384,608,000.00	488,972,196,500.00	503,641,364,500.00	518,750,605,500.00	534,313,123,500.00
3	Dana Alokasi Khusus	188,189,575,000.00	117,228,229,000.00	117,967,501,000.00	117,302,291,500.00	123,562,447,000.00	134,341,009,500.00
4	DID (Dana Insentif Daerah)	25,251,347,000.00	7,575,404,000.00	25,251,347,000.00	27,776,482,000.00	30,554,129,500.00	33,608,542,500.00
5	Dana Desa dan Desa Adat	109,167,748,000.00	109,167,748,000.00	113,555,259,000.00	118,097,468,900.00	122,821,367,000.00	127,734,221,500.00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	46,618,798,420.00	52,144,709,000.00	54,751,944,500.00	57,488,541,500.00	60,364,018,500.00	63,362,219,500.00
7	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintahan Daerah Lainnya	1,500,000,000.00	0.00	0.00			

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
1	Hibah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
2	Dana Desurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dana Pengesahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerimaan pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	8,12%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akip	80,00% 69,25%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah**

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 yang dijadikan target Tahunan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 :

**Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12%	10,83%	133,37%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	80,78	100,98%
		- Nilai AKIP	69,25	76,43	110,37%

Pengukuran kinerja terhadap target indikator pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut :

**1. SASARAN 1 :**

**Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah** dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan Target 8,12%.

Sebagai Dasar untuk mengukur Capaian Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yakni Realisasi dari Target Pendapatan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat pada APBDP Tahun 2023 yang telah



ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

**Rekapitulasi Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PAD Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023**

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan Daerah			PAD yang dikelola BAPENDA		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Pajak Daerah</b>	<b>32.449.222.773,00</b>	<b>35.466.098.703,00</b>	<b>109,30</b>	<b>32.449.222.773,00</b>	<b>35.466.098.703,00</b>	<b>109,30</b>
	Pajak Hotel	428.500.000,00	496.534.583,00	115,88	428.500.000,00	496.534.583,00	115,88
	Pajak Restoran	4.491.372.773,00	3.763.460.745,00	83,79	4.491.372.773,00	3.763.460.745,00	83,79
	Pajak Hiburan	7.550.000,00	9.344.900,00	123,77	7.550.000,00	9.344.900,00	123,77
	Pajak Reklame	514.000.000,00	367.964.398,00	71,59	514.000.000,00	367.964.398,00	71,59
	Pajak Penarangan Jalan	14.000.000.000,00	16.631.172.549,00	118,79	14.000.000.000,00	16.631.172.549,00	118,79
	Pajak Parkir	65.000.000,00	46.775.700,00	71,96	65.000.000,00	46.775.700,00	71,96
	Pajak Air Bawah Tanah	82.000.000,00	25.084.172,00	30,59	82.000.000,00	25.084.172,00	30,59
	Pajak Sarang Burung Walet	295.000.000,00	52.576.000,00	17,82	295.000.000,00	52.576.000,00	17,82
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.645.800.000,00	2.073.029.000,00	125,96	1.645.800.000,00	2.073.029.000,00	125,96
Pajak PBB P2	5.500.000.000,00	4.810.342.247,00	87,46	5.500.000.000,00	4.810.342.247,00	87,46	
Pajak BPHTB	5.420.000.000,00	7.189.814.409,00	132,65	5.420.000.000,00	7.189.814.409,00	132,65	
2.	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>2.313.111.853,00</b>	<b>2.479.871.795,00</b>	<b>107,21</b>	-	-	-
	Retribusi Jasa Umum	1.032.111.853,00	1.028.357.653,00	99,64	-	-	-
	Retribusi Jasa Usaha	730.000.000,00	952.616.700,00	130,50	-	-	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	551.000.000,00	498.897.442,00	90,54	-	-	-
3.	<b>Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>13.495.329.143,00</b>	<b>12.443.280.635,06</b>	<b>92,20</b>	-	-	-
	Bank Jambi (Dividen)	12.113.000.000,00	11.188.346.843,74	92,37	-	-	-
	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.382.329.143,00	1.254.933.791,32	90,78	-	-	-
4.	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>77.351.418.901,00</b>	<b>79.527.291.446,67</b>	<b>102,81</b>	<b>26.350.000,00</b>	<b>82.346.543,00</b>	<b>312,51</b>
	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	170.000.000,00	822.762.840,00	483,98	-	-	-
	Jasa Giro	4.400.000.000,00	5.425.953.982,31	123,32	-	-	-
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	-	-	-	-	-
	Pendapatan Bunga	12.336.310.084,00	8.502.600.975,68	68,92	-	-	-
	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Denda atas Ketorlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	49.707.794,56	-	-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak	26.350.000,00	82.346.543,00	312,51	26.350.000,00	82.346.543,00	312,51
	Pendapatan Dari Pengembalian	8.512.272.682,00	7.903.006.108,91	92,84	-	-	-
	Pendapatan BLUD	51.896.486.135,00	56.740.913.202,21	109,33	-	-	-
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah PAD (1+2+3+4)</b>	<b>125.609.082.670,00</b>	<b>129.916.542.579,73</b>	<b>103,43</b>	<b>32.475.572.773,00</b>	<b>35.548.445.246,00</b>	<b>109,46</b>

Untuk Mengukur Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisast PAD th 2023}}{\text{Target Pendapatan Daerah pada Renstra /RPJMD th 2023}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 Rp. 129.916.542.579,73 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2023 Sebesar Rp.1.199.800.001.000,00 Jadi, Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. } 129.916.542.579,73}{\text{Rp. } 1.199.800.001.000,00} \times 100\% = 10,83\%$$

Sedangkan mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{10,83\%}{8,12\%} \times 100\% = 133,37\%$$

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 dari Target 8,12% terealisasi 10,83% dengan Capaian Kinerja 133,37%. Yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 109,30%, Retribusi Daerah terealisasi 107,21%, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan terealisasi 92,20% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi 102,81% dari masing-masing Target Penerimaan 100%.

## 2. SASARAN 2 :

### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :**

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 80,00

Hasil Survei pengukuran IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan 9 unsur penilaian antara lain:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk / Hasil Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Maklumat Pelayanan
9. Mekanisme Pengaduan Pelayanan

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2023 terealisasi 80,78 dari target 80,00 dengan capaian kinerja 100,98 %.

- Nilai AKIP .

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan, Implementasi Pelaporan dan Evaluasi SAKIP Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari target Nilai 69,25 terealisasi 76,43 dengan capaian 110,37%.



- **Capaian Kinerja PAD Yang Dikelola Bapenda Tahun 2023**

PAD yang dikelola Bapenda pada Tahun 2023 yakni Pajak Daerah yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan Denda Pajak Daerah) Penerimaan Pendapatan untuk Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 32.449.222.773,00 terealisasi sebesar Rp. 35.466.098.703,00 dengan capaian 109,30% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dari target sebesar Rp. 428.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 496.534.583,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 68.034.583,00 dengan capaian 115,88%
2. Pajak Restoran dari target sebesar Rp. 4.491.372.773,00 terealisasi sebesar Rp. 3.763.460.745,00 terjadi penurunan sebesar Rp.727.912.028,00 dengan capaian 83,79%
3. Pajak Hiburan dari target sebesar Rp. 7.550.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.344.900,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.794.900,00 dengan capaian 123,77%
4. Pajak Reklame dari target sebesar Rp. 514.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 367.964.398,00 terjadi penurunan sebesar Rp.146.035.602,00 dengan capaian 71,59%
5. Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 14.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 16.631.172.549,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.631.172.549,00 dengan capaian 118,79%
6. Pajak Parkir dari target sebesar Rp. 65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.775.700,00 terjadi penurunan sebesar Rp.18.224.300,00 dengan capaian 71,96%
7. Pajak Air Bawah Tanah dari target sebesar Rp. 82.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.084.172,00 terjadi penurunan sebesar Rp.56.915.828,00 dengan capaian 30,59%
8. Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 295.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.576.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp.242.424.000,00 dengan capaian 17,82%

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target sebesar Rp. 1.645.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.073.029.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 427.229.000,00 dengan capaian 125,96 %
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari target sebesar Rp. 5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.810.342.247,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 689.657.753,00 dengan capaian 87,46%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sebesar Rp. 5.420.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.189.814.409,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.769.814.409,00 dengan capaian 132,65%

Sedangkan untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Denda Pajak dari target Rp. 26.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 82.346.543,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 55.996.543,00 dengan capaian 312,51%.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 109,46%, ini disebabkan :

Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target diantaranya Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak BPHTB, sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya akan terus Kami upayakan dan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.



Capaian Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	TAHUN								
		2021			2022			2023		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	<b>PAKAI DAERAH</b>	<b>36.121.319.500,00</b>	<b>31.625.068.048,00</b>	<b>87,28</b>	<b>31.194.496.493,00</b>	<b>33.801.482.169,00</b>	<b>105,83</b>	<b>31.449.322.773,00</b>	<b>35.466.098.703,00</b>	<b>119,20</b>
	- Pajak Hotel	119.950.000,00	185.104.100,00	154,32	180.000.000,00	304.600.667,00	169,22	428.500.000,00	466.534.583,00	115,88
	- Pajak Restoran	3.020.000.000,00	4.076.735.186,00	112,63	3.787.000.000,00	4.711.011.323,00	124,40	4.491.372.773,00	3.703.460.745,00	83,79
	- Pajak Hiburan	11.840.000,00	3.594.500,00	30,36	5.000.000,00	3.844.550,00	76,80	7.550.000,00	9.344.900,00	123,77
	- Pajak Reklame	436.000.000,00	354.084.745,00	81,21	500.000.000,00	422.908.324,00	84,58	514.000.000,00	367.964.398,00	71,59
	- Pajak Pemertan Jalan	18.125.230.000,00	18.071.016.242,00	99,72	13.870.000.000,00	17.010.434.126,00	122,64	14.000.000.000,00	16.631.172.519,00	118,79
	- Pajak Parkir	20.000.000,00	30.566.400,00	142,25	35.000.000,00	40.569.600,00	115,74	65.000.000,00	46.775.700,00	71,96
	- Pajak Air Tanah	65.000.000,00	21.101.355,00	33,49	80.000.000,00	21.270.828,00	25,97	82.000.000,00	25.884.172,00	30,59
	- Pajak Sempang Bawang Wadai	200.000.000,00	115.044.800,00	57,52	205.000.000,00	78.461.000,00	26,60	205.000.000,00	52.376.000,00	17,82
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.524.330.500,00	1.584.336.425,00	103,97	1.524.330.500,00	1.330.805.000,00	87,31	1.645.800.000,00	2.073.029.000,00	125,96
	- PBB P2	5.500.000.000,00	4.582.644.329,00	83,32	5.500.000.000,00	4.639.394.692,00	83,80	5.500.000.000,00	4.810.342.247,00	87,46
	- Pajak BPHTB	6.500.000.000,00	2.697.409.963,00	40,11	5.416.495.993,00	4.480.481.795,00	82,72	5.420.000.000,00	7.189.814.409,00	132,65
	2.	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>3.430.808.796,00</b>	<b>2.463.797.272,00</b>	<b>71,78</b>	<b>3.580.246.250,00</b>	<b>3.422.698.393,17</b>	<b>95,38</b>	<b>3.213.111.853,00</b>	<b>2.479.873.795,00</b>
- Retribusi Jasa Umum		1.749.708.796,00	1.232.171.053,00	70,79	1.626.286.250,00	1.502.403.818,00	92,38	1.022.111.853,00	1.028.377.653,00	99,64
- Retribusi Jasa Usaha		788.600.000,00	777.082.200,00	98,54	735.000.000,00	828.095.200,00	109,68	730.000.000,00	952.616.700,00	130,50
- Retribusi Perizinan Tertentu		901.500.000,00	556.453.419,00	61,73	200.000.000,00	92.199.375,17	46,10	551.000.000,00	498.897.442,00	90,54
3.	<b>HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>13.238.139.080,00</b>	<b>10.719.912.978,50</b>	<b>80,98</b>	<b>11.228.000.000,00</b>	<b>11.703.638.97,00</b>	<b>104,25</b>	<b>13.495.379.143,00</b>	<b>12.443.289.635,86</b>	<b>92,20</b>
	- Hasil Bumi (Deviasi)	11.733.139.900,00	9.638.772.829,50	82,10	9.796.000.000,00	10.528.956.340,30	107,48	13.113.000.000,00	11.188.346.843,74	92,37
	- Hasil Perekawinan Rakyat (B19) Danjago Raju	1.506.000.000,00	1.081.143.149,00	71,79	1.430.000.000,00	1.174.702.047,10	82,15	1.382.329.143,00	1.254.933.791,32	90,76
4.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>67.689.325.510,00</b>	<b>79.865.756.712,14</b>	<b>108,79</b>	<b>70.692.348.500,00</b>	<b>83.238.825.818,81</b>	<b>104,64</b>	<b>77.251.418.900,00</b>	<b>79.527.291.446,67</b>	<b>102,83</b>
	- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	393.000.000,00	517.783.640,00	131,75	582.000.000,00	958.302.540,00	164,66	170.000.000,00	822.702.840,00	483,98
	- Jasa Giro	700.000.000,00	2.075.367.698,41	296,48	500.000.000,00	5.028.591.441,71	1.007,59	4.400.000.000,00	5.425.953.882,31	123,32
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergilir	395.016.510,00	5.432.260,00	1,38	765.674.600,00	-	-	10.000.000,00	-	-
	- Pendapatan Bunga	12.550.000.000,00	12.401.452.027,92	100,41	8.000.000.000,00	4.877.306.870,45	60,97	12.336.130.084,00	8.502.600.975,88	68,92
	- Penerimaan Atas Tujuan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	4.516.000,00	-	-	39.993.000,00	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda atau Kotaharaban Pelaksanaan Pekerjaan	-	119.174.606,26	-	-	63.535.239,11	-	-	49.707.784,96	-
	- Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	117.636.411,00	1.176,36	26.350.000,00	58.672.782,00	222,67	26.350.000,00	82.346.543,00	312,51
	- Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda Pengambilan	5.810.000.000,00	4.430.590.728,55	76,25	7.001.600.000,00	2.133.458.904,00	30,47	8.512.272.680,00	7.908.066.308,01	92,84
	- Pendapatan BLUD	36.350.000.000,00	42.096.273.188,00	117,46	51.316.014.900,00	58.087.370.216,45	114,36	51.896.486.135,00	56.740.913.202,21	109,33
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada PKTP	11.451.309.000,00	10.092.857.875,00	96,00	11.451.309.000,00	10.591.484.725,00	198,55	-	-	-
	- Pendapatan Denda Atas Pelaksanaan Peranan Daerah	-	26.882.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan dari Perizinan, Lainnya	-	17.984.800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah PAD</b>		<b>120.449.593.706,00</b>	<b>118.516.444.007,64</b>	<b>98,40</b>	<b>124.644.311.343,00</b>	<b>130.489.014.294,38</b>	<b>104,68</b>	<b>125.609.082.670,00</b>	<b>129.516.542.579,73</b>
5.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.182.004.537.563,00</b>	<b>1.375.003.659.861,00</b>	<b>116,33</b>	<b>1.250.224.459.660,00</b>	<b>1.534.305.841.135,00</b>	<b>122,72</b>	<b>1.324.886.356.820,00</b>	<b>1.360.439.704.981,00</b>	<b>102,70</b>
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.123.019.828.705,00	1.306.889.767.885,00	116,37	1.174.968.061.900,00	1.456.342.061.450,00	123,95	1.233.788.648.849,00	1.276.402.017.610,00	103,97
	- Dana Penimbangan	988.580.733.705,00	1.172.474.050.185,00	118,60	1.067.821.796.000,00	1.349.195.795.145,00	126,35	1.117.214.723.849,00	1.151.828.029.010,00	103,28
	- Dana Insentif Daerah (DID)	25.251.347.000,00	25.251.347.000,00	100,00	11.445.780.000,00	11.445.780.000,00	100,00	17.484.167.000,00	17.484.167.000,00	100,00
	- Dana Desa	109.187.748.000,00	109.164.570.690,00	99,98	95.700.485.000,00	95.700.485.000,00	100,00	99.079.758.000,00	99.079.758.000,00	100,00
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	58.984.708.858,00	68.113.891.976,00	115,48	75.256.308.160,00	77.963.780.990,00	103,60	93.867.707.971,00	90.237.707.971,00	99,06
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	52.144.708.858,00	60.073.891.976,00	115,21	61.856.398.160,00	64.563.780.990,00	104,38	77.647.707.971,00	77.647.707.971,00	100,00
- Bantuan Keuangan dari Provinsi	6.840.000.000,00	8.040.000.000,00	117,54	13.400.000.000,00	13.400.000.000,00	100,00	14.890.000.000,00	13.190.000.000,00	93,98	
6.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>43.483.350.000,00</b>	<b>46.869.026.824,00</b>	<b>107,79</b>	<b>9.121.42.858,00</b>	<b>196.207.214,00</b>	<b>20,84</b>	-	<b>89.616.000,00</b>	<b>-</b>
	- Pendapatan Hibah	43.483.350.000,00	46.869.026.824,00	107,79	-	-	-	-	-	
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Dana Perijinan dan Operasi Klaster	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada PKTP	-	-	-	942.142.858,00	196.207.214,00	20,84	-	89.616.000,00	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>1.345.937.481.269,00</b>	<b>1.340.399.130.692,64</b>	<b>111,45</b>	<b>1.375.810.913.241,00</b>	<b>1.665.016.589.341,07</b>	<b>121,02</b>	<b>1.450.485.439.490,00</b>	<b>1.490.645.884.160,73</b>	<b>102,77</b>

Data Laporan Penerimaan Tahun 2023 Un.Audit BPK RI



• Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

NO.	JENIS PENERIMAAN	2023			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
A.	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>32.449.222.773,00</b>	<b>35.466.098.703,00</b>	<b>109,30</b>	
1.	<b>Pajak Hotel</b> Hotel Melati Satu Lussemb/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos	<b>428.500.000,00</b> 400.000.000,00 28.500.000,00	<b>496.534.583,00</b> 479.085.483,00 17.449.100,00	<b>115,88</b> 119,77 61,22	Realisasi Pajak Hotel Naik sebesar 9,30 % disebabkan 1. Perhatian ini disebabkan mulai berjalannya aktifitas masyarakat terutama para pelaku usaha yang bangkit akibat adanya pandemi covid 19 yang lalu, terutama pengguna jasa perhotelan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di Kec. Tungkal Ilir, 2. Asalnya pertumbuhan dan penambahan usaha Hotel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di Kec. Tungkal Ilir 3. Mulai dibukanya tempat tempat rekreasi, penyediaan antar daerah angkutan crang dan barang yang mendorong dunia usaha perhotelan yang ada di wilayah Kec. Tungkal Ilir semakin bersaing dalam memberikan jasa pelayanan terbaik terhadap pengunjung dan pengunjung Hotel, yang akan menggunakan jasa perhotelan.
2.	<b>Pajak Restoran</b> Rumah Makan Kantin / Warung kopi / Kopi	<b>4.491.372.773,00</b> 3.641.372.773,00 850.000.000,00	<b>3.763.460.745,00</b> 2.524.946.003,00 1.238.514.742,00	<b>83,79</b> 69,34 145,71	Terdapat penurunan sebesar 10,21 % disebabkan : Beberapa perusahaan melakukan penghematan anggaran pasca covid 19 untuk catering bagi karyawan yang ada dalam wilayah kabupaten tanjung jabung barat, juga disebabkan terjadinya pengaruh ekonomi masyarakat akibat melonainya harga hasil pertanian dan perkebunan, sehingga berpengaruh terhadap usaha kuliner.
3.	<b>Pajak Hiburan</b> Pernikahan Bilyard Pusat Kebugaran (Fitness Center) Penyelenggaraan Kesenian/ Musik/ Tanc/ Busana Karaoke Pertandingan Olahraga	<b>7.550.000,00</b> - 5.000.000,00 550.000,00 - 2.000.000,00	<b>9.344.900,00</b> - 3.294.900,00 6.050.000,00 - -	<b>123,77</b> - 65,90 1.100,00 - -	Realisasi Pajak Hiburan Naik Sebesar 23,77 % disebabkan : Mulai berkembangnya dunia olahraga terutama fitness, permainan anak-anak, hiburan anak-anak yang diselenggarakan oleh pihak swasta, dan juga didukung dengan tempat yang memadai untuk menyelenggarakan hiburan secara massal, seperti hiburan malam, permainan anak-anak yang diselenggarakan oleh pihak swasta baik dari dalam kota maupun dari luar kota.
4.	<b>Pajak Reklame</b> Reklame Papan/Bill Board/Videocon/Agurton Reklame Kant/Spanduk	<b>514.000.000,00</b> 460.000.000,00 54.000.000,00	<b>367.964.398,00</b> 331.435.818,00 36.528.580,00	<b>71,59</b> 72,05 67,65	Terdapat penurunan sebesar 28,41 % disebabkan : 1. harga hasil pertanian dan perkebunan mengalami penurunan dan tingkat ekonomi pendapatan masyarakat menurun sehingga kebanyakan pengusaha toko masih ada yang belum melakukan aktifitasnya. 2. kesediaan dan keseimbangan perekonomian masyarakat khususnya wajib pajak masih kurang sehingga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan perpajakan. 3. Pemenuhan terhadap perkembangan izn perundangan izn perundangan maupun tempat usaha tidak terpenuhi meringkat perpanjangan izn melalui aplikasi OSS mengingat yang sebelumnya ketika suatu usaha yang akan melakukan perpanjangan izn, perpanjangan Reklame para pelaku usaha melakukan pembayaran Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda ).

5.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b> Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN	14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 -	16.631.172.549,00 16.631.172.549,00 -	118,79 118,79 -	Realisasi Pajak PPLJ mengalami peningkatan sebesar 18,79% adanya peningkatan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Oleh PLN yang mana peningkatan penjualan daya listrik, mengalami kenaikan yang disebabkan penambahan pelanggan baru pengguna Listrik.
6.	<b>Pajak Parkir</b>	65.000.000,00	46.775.700,00	71,96	Terdapat penurunan sebesar 28,04% disebabkan: Berkurangnya pengunjung terhadap usaha-usaha, supermarket, swalayan dan bank-bank dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7.	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	82.000.000,00	25.084.172,00	30,59	Realisasi Pajak Air Bawah Tanah berkurang sebesar 69,41% disebabkan : Banyaknya pelanggan ABT yang beralih menggunakan PDAM ( sehingga Pelanggan Sumur Bor banyak yang beralih) Dasar pengalihan untuk perusahaan Gas dan Minyak menunggu perubahan Permen ESDM no. 20 tahun 2017 tentang penggunaan air tanah.
8.	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	295.000.000,00	52.576.000,00	17,82	Realisasi Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet berkurang sebesar 82,18% disebabkan oleh: 1. Berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah kec. Tungkai Ilir, Brani Kam, dan Belara sehingga dampak hasil Sarang Burung Walet berkurang. 2. Penangkaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi/ulup.
9.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b> Pasir Tanah Liat Kerikil Batu Split Tanah Urug Tanah Lateralik Tanah Serap (Fulfers Earth)	1.645.800.000,00 20.000.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 1.121.000.000,00 - 2.500.000,00 500.000.000,00	2.073.029.000,00 - - - 1.074.375.000,00 - 26.824.000,00 971.830.000,00	125,96 - - - 95,84 - 1.072,96 194,37	Terdapat Peningkatan sebesar 25,80% disebabkan Pengambilan dan Penambangan Sumber Daya Alam berupa, Penambangan Tanah Urug, Penambangan Bahan Baku/lempur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat, dan adanya ketertarikan para pengusaha tambang untuk melaporkan hasil penambangannya ke bupati secara jujur.
10.	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b> Perdesaan Perkotaan	5.500.000.000,00 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00	4.810.342.247,00 3.863.541.716,00 946.800.531,00	87,46 154,54 31,56	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan berkurang sebesar 12,54% disebabkan 1. Adanya data tidak valid 2. Objek Pajak tidak ditemukan 3. SPPT Ganda 4. Kesadaran Masyarakat Masih Kurang dalam Pembayaran PBB-P2 5. Pelayanan Masih keliling ke Kecamatan Belum Maksimal
11.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	5.420.000.000,00	7.189.814.409,00	132,65	Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Mengalami kenaikan sebesar 32,65% di sebabkan : 1. adanya proses penyetoran Pajak BPHTB dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kab. Tanjung Jabung Barat 2. Banyak Permohonan Berkas BPHTB dari Masyarakat pada Tahun 2023 Sehingga target dapat terpenuhi.



<b>B</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2.313.111.853,00</b>	<b>2.479.871.795,00</b>	<b>107,21</b>	
12.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Retribusi Pelayanan Persampuln/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Pengendalian Memara Telekomunikasi	1.032.111.853,00 83.356.037,00 60.000.000,00 90.000.000,00 110.000.000,00 175.000.000,00 5.000.000,00 410.000.000,00	1.028.357.653,00 83.356.037,00 59.660.000,00 72.422.000,00 116.265.000,00 202.855.000,00 9.212.800,00 407.778.000,00	99,64 100,00 99,43 80,47 105,70 115,92 184,26 99,46	OPD Dinas Lingkungan Hidup OPD Dinas Pertukangan OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi OPD Dinas Pertukangan OPD Dinas Kominfo
13.	Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Tanah - Retribusi Penyewaan Bangunan - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemakaian Alat - Retribusi Terminal - Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	730.000.000,00 350.000.000,00 40.000.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 70.000.000,00 270.000.000,00 40.000.000,00	952.616.700,00 353.883.000,00 176.593.000,00 103.890.000,00 27.900.000,00 45.500.000,00 80.869.000,00 445.457.200,00 72.407.500,00	130,50 101,11 441,48 122,22 111,60 22,75 115,53 164,98 181,02	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang OPD Dinas Perhubungan OPD Dinas Perhubungan OPD Dinas Pariwisata, Kepemudaran dan Olahraga
14.	Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Retribusi Gangguan / HO Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Perijinan DMTA	551.000.000,00 200.000.000,00 - - 1.000.000,00 350.000.000,00	498.897.442,00 182.227.042,00 - - - 316.670.400,00	90,54 91,11 - - - 90,48	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - - -
<b>C</b>	<b>HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN</b>	<b>13.495.329.143,00</b>	<b>12.443.280.635,06</b>	<b>92,20</b>	
15.	Bank Jambi (Deviden)	12.113.000.000,00	11.188.346.843,74	92,37	
16.	Bank Perkreditian Rakyat (BPR) Tangge Rajo	1.382.329.143,00	1.254.933.791,32	90,78	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>D</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>77.351.418.901,00</b>	<b>79.527.291.446,67</b>	<b>102,81</b>	
17.	Hasil Pengujian BMMD Yang Tidak Di Pisahkan	170.000.000,00	822.762.840,00	483,98	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
18.	Penerimaan Jasa Citra	4.400.000.000,00	5.425.953.982,31	123,32	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
19.	Pendapatan Bunga	12.336.310.084,00	8.502.600.975,68	68,92	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah



20.	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	49.707.794,56	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
22.	Pendapatan Denda Pajak	26.340.000,00	82.346.543,00	312,51	OPD Badan Pendapatan Daerah
23.	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	
24.	Pendapatan Dari Pengembalian	8.512.272.682,00	7.920.804.658,91	93,05	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
25.	Pendapatan BLUD	51.896.486.135,00	56.740.913.202,21	109,33	OPD Dinas Kesehatan
26.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	
28.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	-	-	
29.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	49.707.794,56	-	

## Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	2023		%	Alasan
		Target	Realisasi		
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.324.886.356.820,00</b>	<b>1.360.639.724.981,00</b>	<b>102,70</b>	
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT</b>	<b>1.233.788.648.849,00</b>	<b>1.270.402.017.010,00</b>	<b>102,97</b>	
1.	Dana Perimbangan	1.117.214.723.849,00	1.153.828.092.010,00	103,28	Terjadinya peningkatan sebesar 2,97% di sebabkan : Terdapatnya surplus Penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dikurangkan dari penyediaan Kurang Bayar Tahun 2022 secara keseluruhan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 211/PMK/07/ Tahun 2022 tentang perubahan Keputusan atas PMK No. 139/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF).
	<b>Dana Transfer Uraun Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>443.598.320.849,00</b>	<b>487.557.645.157,00</b>	<b>109,91</b>	
	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	142.913.495.109,00	149.659.210.496,00	104,72	
	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	7.178.907.080,00	7.546.604.160,00	105,12	
	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 & Pasal 29/ WPPEDN	201.618.868,50	217.330.737,00	107,79	
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.769.849,00	41.058.179,00	606,49	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral Bumi	135.246.291.272,50	140.966.402.545,00	104,23	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	126.702.229.501,00	134.734.756.002,00	106,34	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (Randren)	11.135.529,00	17.498.058,00	157,14	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (Royalti)	19.468.936.168,00	21.937.338.336,00	112,68	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan	10.247.057.866,50	9.262.293.433,00	90,39	
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	-	-	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan	-	-	-	
	Dana Bagi Hasil Usaha Pemanfaatan Hutan (DUPH)	-	-	-	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Dana Rebasasi	-	-	-	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.621.888.605,50	1.727.765.211,00	106,53	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Sawit	-	21.447.388.000,00	-	
	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>496.580.909.000,000</b>	<b>496.580.909.000,000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>177.035.485.000,00</b>	<b>169.674.139.982,00</b>	<b>95,84</b>	
	a. DAK Fisik	41.637.990.000,00	40.889.963.150,00	98,20	
	b. DAK Non Fisik	135.397.495.000,00	128.784.176.832,00	95,12	
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	17.494.167.000,00	17.494.167.000,00	100,00	
3.	Dana Desa	99.079.758.000,00	99.079.758.000,00	100,00	

No.	Jenis Penerimaan	2023		%	Alasan
		Target	Realisasi		
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>91.097.707.971,00</b>	<b>90.237.707.971,00</b>	<b>99,06</b>	
1.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>77.047.707.971,00</b>	<b>77.047.707.971,00</b>	<b>100,00</b>	Terjadinya Penurunan sebesar 0,94% di sebabkan : Terdapat Surplus dari Pendapatan target Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak provinsi Jambi untuk Kabupaten dikarenakan penyediaan kurang salah Dana Bagi Hasil Pajak Pokok sesuai dengan SK penetapan alokasi Gubernur Nomor 139/KEP/GUB/BPKPD-2/2023
	a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.880.242.682,00	15.395.038.607,00	103,46	
	b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.666.366.860,00	13.531.783.144,00	139,99	
	c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.111.087.707,00	30.258.169.859,00	91,38	
	d. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukiman	209.198.504,00	158.594.895,00	75,81	
	e. Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.180.812.218,00	17.704.121.466,00	92,30	
2.	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>	<b>14.050.000.000,00</b>	<b>13.190.000.000,00</b>	<b>93,88</b>	
	a. Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi untuk Desa dan Kelurahan	14.050.000.000,00	13.190.000.000,00	93,88	
	b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	-	-	

### Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan/Penurunan Target Terhadap Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	2023		%	Alasan
		Target	Realisasi		
1.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	<b>89.616.600,00</b>	-	-
1.	<b>Pendapatan Hibah dari Dana Bos</b>	-	-	-	-
	a. BOS SD	-	-	-	-
	b. BOS SMP	-	-	-	-
	c. BOS Afirmasi	-	-	-	-
	d. BOS Kinerja	-	-	-	-
2.	<b>Pendapatan atas Pengembalian Hibah</b>	-	-	-	-
3.	<b>Pendapatan Dana Kapitasi SKN pada FKTP</b>	-	<b>89.616.600,00</b>	-	-



## ❖ **Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022-2023 terjadi Penurunan, dari tabel Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022-2023 diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Rp. 1.665.016.502.341,07 sedangkan Tahun 2023 Rp. 1.490.645.884.160,73. Jumlah tersebut merupakan Akumulasi dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah ditambah Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2022-2023 terjadi Penurunan, Realisasi PAD Tahun 2022 Sebesar Rp.130.480.014.294,38, Target Penerimaan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2022 Sebesar Rp.1.150.000.000.000,00 dan Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Sebesar 8,06% terealisasi sebesar 11,35% Sedangkan Untuk Tahun 2023 Realisasi Penerimaan Asli Daerah Sebesar Rp. 129.916.542.579,73 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Rp.1.199.800.001.000,00 dari Target 8,12% terealisasi sebesar 10,83% terjadi Penurunan sebesar 0,52% dari Tahun Sebelumnya.

### **2. Pendapatan Transfer**

Penerimaan Pendapatan Transfer Mengalami Penurunan dari Tahun Sebelumnya, Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2022 Sebesar Rp.1.534.305.841.135,00 dari Target Rp. 1.250.224.459.160,00 atau 122,72% sedangkan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp.1.360.639.724.981,00 dari Target Rp.1.324.886.356.820,00 atau 102,70%. Pendapatan Transfer Terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 yang Bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp. 89.616.600,00.

### 4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Realisasi		Jumlah	Kinerja (%)
	Pajak Daerah	Lain-lain PAD yang sah		
2021	31.635.068.045,00	117.636.411,00	31.752.704.456,00	2,99
2022	33.014.821.695,00	58.672.782,00	33.073.494.477,00	4,16
2023	35.466.098.703,00	82.346.543,00	35.548.445.246,00	7,48

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2022 - 2023 mengalami Peningkatan. Tahun 2022 tercapai sebesar 4,16%, sedangkan untuk Tahun 2023 Sebesar 7,48%

### 5. Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kontribusi Penerimaan PAD yang dikelola Bapenda terhadap PAD Tahun 2021-2023.

Tahun	Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Realisasi PAD yang dikelola Dipenda	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan Daerah	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)
2021	1.540.399.130.692,64	118.526.444.007,64	7,69	31.752.704.456,00	2,06	26,79
2022	1.665.016.502.341,07	130.480.014.294,38	7,84	33.073.494.477,00	1,99	25,35
2023	1.490.645.884.160,73	129.916.542.579,73	8,72	35.548.445.246,00	2,38	27,36

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2022-2023 berkisar di atas 7% - 8%, sedangkan Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2022-2023 hanya berkisar antara 1% - 2%, untuk tahun 2023 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 8,72%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 2,38% dan Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 27,36%.



### 3. Capaian Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Rpjmd Menurut Urusan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021 sampai dengan 2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran P/AD						Realisasi Kinerja Sasaran P/AD						Capaian Kinerja Sasaran P/AD					
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhdap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	7,90%	8,06%	8,13%	8,16%	8,18%	8,18%	9,77%	11,45%	16,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase capaian penerimaan PBB dan BPHTB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,92%	83,28%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase capaian penerimaan pajak lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	101,34%	117,98%	109,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	3 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	6 Kali	10 Kali	3 Kali	8 Kali	7 Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Analisa dan Kerejoberagan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD					
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026
1		Jumlah aplikasi yang dikelola	5 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi
2		Indeks Kepuasan Masyarakat NIBal AKIP	78,24	79,00	80,00	81,00	82,09	83,00	83,88	83,73	80,78	-	-	-	-	100,83%	108,99%	100,98%	-	-
		Perentase pemenuhan komponen IKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
		Perentase teman hasil pemerkasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
		Perentase pemenuhan komponen SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-

Evaluasi terhadap Capaian RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	7,98%	9,77%	8,06%	11,35%	8,12%	10,83%	8,16%		8,18%				8,18%		BAPENDA
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,95%	7,91%	7,00%	7,84%	7,07%	8,72%	7,27%		7,68%				8,42%		BAPENDA
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah															BAPENDA
a. Pajak Daerah	11	11	11	11	11	11	11		11				11		BAPENDA
b. Retribusi Daerah	3	3	3	3	3	3	3		3				3		BAPENDA



Sebagaimana tabel diatas dapat kami jabarkan bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 dari target 8,12% terealisasi sebesar 10,83% , Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dari Target 7,07% terealisasi 8,72%, dengan 11 Jenis Pajak Daerah dan 3 Jenis Retribusi Daerah.

#### 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### ➤ Sumber Daya Aparatur

##### 1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 129 Orang, terdiri dari PNS sebanyak 46 Orang dan Tenaga Kontrak/Honorer sebanyak 83 Orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada sebagai berikut :

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	46	36,00
2.	TKS/TKK	83	64,00
	<b>Jumlah</b>	<b>129</b>	<b>100,00</b>

Dari jumlah pegawai tersebut diatas, dapat di klarifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

**Tabel a – Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

Gol	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
II	4	-	-	-	4	3.10
III	38	-	-	-	38	29.46
IV	4	-	-	-	4	3.10
Tenaga Kontrak	-	-	-	83	83	64.34
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>129</b>	<b>100,00</b>

**Tabel b – Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Laki-laki	21	-	-	41	62	48,00
Perempuan	25	-	-	42	67	52,00
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>129</b>	<b>100,00</b>

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut:

- 1) Sekretariat : 45 Orang
- 2) Bidang PBB-P2 dan BPHTB : 27 Orang
- 3) Bidang Pajak Daerah : 25 Orang
- 4) Bidang Pengendalian dan Pelaporan : 16 Orang
- 5) Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah : 16 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatannya:

- 1) Eselon II B (Kepala Badan) : 1 Orang
- 2) Eselon III A (Sekretaris) : 1 Orang
- 3) Eselon III B (Kepala Bidang) : 4 Orang
- 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/JFT) : 9 Orang
- 5) Pelaksana : 114 Orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)

**Tabel c – Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Strata-2 (S2)	3	-	-	-	3	2.33
Strata-1 (S1)	27	-	-	44	71	55.04
Sarjana Terapan/D4	-	-	-	1	1	0.78
Sarjana Muda/D3	4	-	-	1	5	3.88
SLTA/SMK	12	-	-	35	47	36.43
SD	-	-	-	2	2	1.55
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>129</b>	<b>100,00</b>

**Tabel d – Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan**

Strata Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
<b>Magister</b>						
1. Magister Ekonomi	2	-	-	-	2	1.55
2. Magister Sosial dan Politik	1	-	-	-	2	1.55
<b>Sarjana</b>						
1. Ilmu Sains/Biologi	-	-	-	1	1	0.78
2. Ilmu Sosial	-	-	-	-	-	-
3. Ilmu Ekonomi Manajemen	13	-	-	17	30	23.26
4. Ilmu Ekonomi Akutansi	1	-	-	1	2	1.55
5. Ilmu Ekonomi Pembangunan	1	-	-	4	5	3.88
6. Ilmu Pendidikan	-	-	-	4	4	3.10
7. Ilmu Pemerintahan	-	-	-	1	1	0.78
8. Ilmu Administrasi Negara	1	-	-	1	2	1.55
9. Ilmu Administrasi Publik	2	-	-	-	2	1.55
10. Ilmu Administrasi Perpajakan	2	-	-	-	2	1.55
11. Pertanian	1	-	-	-	1	0.78
12. Hukum	3	-	-	6	9	6.98
13. Ilmu Komunikasi dan penyiaran Islam	2	-	-	6	8	6.20
14. Teknik Informatika	-	-	-	1	1	0.78
15. Kehutanan	1	-	-	1	2	1.55
16. Kesehatan	-	-	-	1	1	0.78
<b>Sarjana Terapan</b>						
1. Perpajakan	-	-	-	1	1	0.78
<b>Sarjana Muda</b>						
1. Manajemen Informatika	1	-	-	-	1	0.78
2. Teknik Informatika	1	-	-	-	1	0.78
3. Akutansi Keuangan	1	-	-	-	1	0.78
4. Manajemen Perusahaan	1	-	-	-	1	0.78
5. Komputer	-	-	-	1	1	0.78
<b>Menengah Kejuruan</b>	6	-	-	5	11	8.53
<b>Menengah Atas</b>	6	-	-	30	36	27.91
<b>Sekolah Dasar</b>	-	-	-	2	2	1.55
<b>Total</b>	46	-	-	83	129	100



Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominatif, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), LP2P, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, buku induk pegawai.
- 2) Pengembangan pegawai.
- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan DP3.
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel e berikut ini:

**Tabel e – Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan**

Jabatan/Staf	Jumlah	%
Spama/Diklat PIM III	2	20
Adun/Adumla/Diklat	8	80
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

#### ➤ Sarana Prasarana

Pada saat ini Kantor Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2023 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

**Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Per 31 Desember 2023**

Uraian	2022
<b>ASET</b>	<b>17.834.076.892,36</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.248.077.742,36</b>
<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>8.700.659.376,50</b>
Piutang Pajak Daerah	8.700.659.376,50
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(6.900.345.394,14)</b>
Penyisihan Piutang Pendapatan	(6.900.345.394,14)
<b>Beban dibayar di muka</b>	<b>12.203.170,00</b>
Beban Jasa dibayar di muka	12.203.170,00
<b>Persediaan</b>	<b>435.560.590,00</b>
Persediaan Bahan Pakai Habis	435.560.590,00
Persediaan Barang Lainnya	-
<b>ASET TETAP</b>	<b>15.580.149.985,00</b>
<b>Tanah</b>	-
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>9.657.011.028,47</b>
Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	2.549.796.500,00
Alat Ukur	89.100.000,00
Alat Kantor	2.486.716.472,47
Alat Rumah Tangga	1.863.273.873,00
Komputer	3.696.594.306,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	186.074.500,00
Alat Studio	549.529.000,00
Alat Komunikasi	3.490.000,00
Peralatan Pemancar	295.515.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>17.479.629.402,53</b>
Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.762.954.902,53

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	716.674.500,00
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>64.760.000,00</b>
Bangunan Air (Irigasi)	64.760.000,00
<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>	<b>8.943.000,00</b>
Konstruksi dalam pengerjaan	8.943.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(11.630.193.446,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.579.701.644,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.026.746.474,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	(23.745.328,00)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.849.165,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>-</b>
Aset Tak Berwujud lainnya	837.300.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(837.300.000,00)
Aset lain-lain	2.034.953.623,00
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	(2.029.104.458,00)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>17.834.076.892,36</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>70.168.130,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>70.168.130,00</b>
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>70.168.130,00</b>
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	70.168.130,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>70.168.130,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>17.763.908.762,36</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>17.763.908.762,36</b>
Ekuitas	17.763.908.762,36
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>17.763.908.762,36</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>17.834.076.892,36</b>



➤ **Pendanaan**

Jumlah belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebesar Rp. 11.804.576.801,00 terealisasi Rp. 11.144.953.748,50 atau 94,41% yang terdiri dari :

1. Belanja Operasional dari anggaran Rp. 11.685.941.601,00 terealisasi Rp. 11.026.353.748,50 atau 94,36% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 659.587.852,50 atau 5,64%.
2. Belanja Modal dari anggaran Rp. 118.635.200,00 terealisasi Rp. 118.600.000,00 atau 99,97% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 35.200,00 atau 0,03%

**5. Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pencapaian target pada pernyataan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dengan jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran		Realisasi	
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan	
				Jumlah	%
PROGRAM PENDUKUNG					
1.	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.469.273.789	80,22	8.888.480.549	93,87
PROGRAM UTAMA					
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.335.303.012	19,78	2.256.473.200	96,62
<b>JUMLAH 2023</b>		<b>11.804.576.801</b>	<b>100,00</b>	<b>11.144.953.749</b>	<b>94,41</b>

Dari tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 1 Program Pendukung dan 1 Program Utama. Program Pendukung dengan penyerapan anggaran 93,87% sebagai efisiensi anggaran Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah setelah APBDP Tahun 2023 Penyerapan Anggaran sebesar 94,41% .

Dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan Indikator dan Target Kinerja Kepala Bidang yang dijadikan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PK) Eselon III antara lain:

### **1. Bidang Pajak Daerah**

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Persentase Capaian Penerimaan Pajak Lainnya dengan Target 100% Bidang Pajak Daerah mengelola 9 Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir. Realisasi jumlah penerimaan 9 Pajak Daerah yang dikelola oleh Bidang Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 23.465.942.047,00 atau (109,00%) Dari Target sebesar Rp. 21.529.222.773,00 .Pajak Daerah yang Realisasinya tidak mencapai 100% antara lain :

- Pajak Restoran, ini disebabkan Beberapa perusahaan melakukan penghematan anggaran pasca covid 19 untuk catering bagi karyawan yang ada dalam wilayah kabupaten tanjung jabung barat, juga disebabkan terjadinya pengaruh ekonomi masyarakat akibat melemahnya harga hasil pertanian dan perkebunan, sehingga berpengaruh terhadap usaha kuliner.
- Pajak Reklame disebabkan harga hasil pertanian dan perkebunan mengalami penurunan dan tingkat ekonomi pendapatan masyarakat

menurun sehingga kebanyakan pengusaha toko masih ada yang belum melakukan aktifitas/tutup, kestabilan dan keseimbangan perekonomian masyarakat khususnya wajib pajak masih kurang sehingga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan perpajakan dan Pemantauan terhadap perpanjangan izin perdagangan tempat usaha tidak terpantau mengingat perpanjangan Izin melalui aplikasi OSS ,mengingat yang sebelumnya ketika suatu usaha yang akan melakukan perpanjangan izin, perpanjangan Reklame para pelaku usaha melakukan pembayaran Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ).

- Pajak Parkir di Sebabkan Berkurangnya pengunjung terhadap usaha-usaha,supermarket,swalayan dan bank-bank dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Pajak Air Bawah Tanah, ini disebabkan oleh banyaknya pelanggan ABT yang beralih menggunakan PDAM ( sehingga Pelanggan Sumur Bor banyak yang beralih) Dasar penagihan untuk perusahaan Gas dan Minyak menunggu perubahan Permen ESDM no. 20 tahun 2017 tentang penggunaan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet, ini disebabkan berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, Bram Itam dan Betara sehingga dampak hasil Sarang Burung Walet Berkurang.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	•Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	8,12%	10,83%	133,37%	



Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		101.660.000.000	129.916.542.579,73	127,80%
		Persentase realisasi penerimaan 9 pajak daerah	21.529.222.773	23.465.942.047	109,00%
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	100,00%
Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%
Penagihan Pajak daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%

## 2. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 100%. Jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2023 sebesar Rp.12.000.156.656,00 atau (109,89) dari Target sebesar Rp. 10.920.000.000,00.

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang PBB -P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	8,12%	10,83%	133,37%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		101.660.000.000	129.916.542.579,73	127,80%	
			Realisasi Penerimaan PBB- P2 dan BPHTB	10.920.000.000	12.000.156.656	109,89%	
	Pendataan dan Pendafitan Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendafitan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	
	Penagihan Pajak daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang diselesaikan NJOP nya	2700 OP	4606 OP	170,59%	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40 Layanan	40 Layanan	100,00%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	

### 3. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mendapatkan laporan penerimaan daerah yang valid Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai koordinator di Bidang Pendapatan Daerah setiap awal bulan melakukan rekonsiliasi dengan 16 SKPD, Lembaga/Instansi terkait baik dari pusat dan daerah serta stakeholder lainnya untuk mensinkronkan data penerimaan pada masing-masing pengelola pendapatan, sedangkan untuk pengendalian penerimaan pendapatan daerah, penerimaan dana transfer dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) namun sebagaimana salah satu tugas dan fungsi pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada Subbidang Dana Transfer antara lain melakukan penyusunan rencana petunjuk dan pelaksana teknis, monitoring dan evaluasi penerimaan dana transfer, pengumpulan data penyaluran dana transfer yang merupakan penerimaan daerah dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan yaitu Jumlah Laporan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Target 16 Laporan dilaksanakan melalui Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	8.12%	10,83%	133,37%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		101.660.000.000	129.916.542.579,73	127,80%	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	16 Laporan	100%	

#### 4. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah. Dalam melakukan tugas bidang pengembangan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, perhitungan potensi pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah serta penyusunan draft regulasi PAD. Pada Tahun 2023 untuk layanan informasi pajak daerah yang muktahir dan akurat terealisasi 100% dengan tersedianya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah dengan memakai 6 Aplikasi antara lain : SISMIOP, BPHTB, SIMPEDA, SIMPAREDA, E-PAYMENT dan Web Bapenda.

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	8,12%	10,83%	133,37%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		101.660.000.000	129.916.542.579,73	127,80%	
	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	7 Laporan	70,00%	Di karenakan keterbatasan Anggaran
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Pajak Daerah	4 Unit	4 Unit	100,00%	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	

## 5. Sekretariat

Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran 2 pada Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akip.

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Persentase temuan audit pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target 90%
- Persentase Pemenuhan Komponen IKM dengan target 100%
- Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP dengan target 100%

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM		80,00%	80,78%	100,98%	
			Nilai SAKIP		69,25%	76,43%	110,37%
			Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	102,46%	102,46%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	100%	
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		▪ Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dok	8 Dok	100%	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bditas Realisasi Kinerja SKPD		▪ Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	12 Lap	12 Lap	100%	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dok	98,48	98,48%	Jumlah ASN Bapenda Tahun 2023 sebanyak 46 Orang
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	46 Orang	95,45%	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	100,00%	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</li> </ul>		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	100%	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ul>		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	12 Lap	100%	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Pakaian Dinas Berserla Atribut Kelengkapannya</li> </ul>		Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserla Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan</li> </ul>		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang	0,00%	Karna tidak ada Bimbingan Teknis yang ter Akreditasi di BKN
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> </ul>		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor</li> </ul>		Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyedia Bahan Logistik Kantor</li> </ul>		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> </ul>		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>		Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dok	12 Dok	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	100,00%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
6.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	11 Unit	11 Unit	100,00%	
	▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	16 Unit	16 Unit	100,00%	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	12 Lap	100,00%	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	12 Lap	100,00%	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap	95,83	95,83%	Karena salah perhitungan asuransi, ternyata pembayaran asuransi dibulan april bukan di akhir tahun
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	83,33	83,33%	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bi aya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	45 Unit	45 Unit	100%	
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	57 Unit	57 Unit	100%	
	▪ Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%	

## B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan target Rp. 32.475.572.773,00 terealisasi sebesar Rp. 35.548.445.246,00 atau 109,46%, sedangkan jumlah Belanja yang di anggarkan pada APBDP Bapenda Tahun 2023 sebesar Rp. 11.804.576.801,00 terealisasi Rp.11.144.953.748,50 atau 94,41% dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>32.475.572.773,00</b>	<b>35.548.445.246,00</b>	<b>109,46</b>
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	32.475.572.773,00	35.548.445.246,00	109,46
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	32.449.222.773,00	35.466.098.703,00	109,30
4.1.1.06.	Pajak Hotel – LRA	428.500.000,00	496.534.583,00	115,88
4.1.1.07.	Pajak Restoran – LRA	4.491.372.773,00	3.763.460.745,00	83,79
4.1.1.08.	Pajak Hiburan – LRA	7.550.000,00	9.344.900,00	123,77
4.1.1.09.	Pajak Reklame – LRA	514.000.000,00	367.964.398,00	71,59
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	14.000.000.000,00	16.631.172.549,00	118,79
4.1.1.11.	Pajak Parkir – LRA	65.000.000,00	46.775.700,00	71,96
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LRA	82.000.000,00	25.084.172,00	30,59
4.1.1.13.	Pajak Sumung Burung Walet – LRA	295.000.000,00	52.576.000,00	17,82
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu – LRA	1.645.800.000,00	2.073.029.000,00	125,96
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	5.500.000.000,00	4.810.342.247,00	87,46
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	5.420.000.000,00	7.189.814.409,00	132,65
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	26.350.000,00	82.346.543,00	312,51
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak – LRA	26.350.000,00	82.346.543,00	312,51
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>11.804.576.801,00</b>	<b>11.144.953.748,50</b>	<b>94,41</b>
5.1.	BELANJA OPERASI	11.685.941.601,00	11.026.353.748,50	94,36
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.067.975.039,00	6.651.370.568,50	94,11
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.218.237.328,00	3.026.133.366,00	94,03
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.004.756.573,00	1.955.201.693,00	97,53



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.033.750.569,00	939.053.520,00	90,84
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	811.230.569,00	730.981.989,50	90,11
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.617.966.562,00</b>	<b>4.374.983.180,00</b>	<b>94,74</b>
5.1.02.01	Belanja Barang	1.131.293.912,00	1.080.144.355,00	95,48
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.567.730.000,00	2.424.264.214,00	94,41
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	351.930.000,00	308.110.710,00	87,55
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	519.962.650,00	515.413.901,00	99,13
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.050.000,00	47.050.000,00	100,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>118.635.200,00</b>	<b>118.600.000,00</b>	<b>99,97</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>118.635.200,00</b>	<b>118.600.000,00</b>	<b>99,97</b>
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.873.200,00	39.860.000,00	99,97
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.300.000,00	8.290.000,00	99,98
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	70.462.000,00	70.450.000,00	99,98
<b>5.Z</b>	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>20.670.995.972,00</b>	<b>24.403.491.497,50</b>	<b>118,06</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Untuk Penerimaan Daerah Tahun 2023 dari target Rp. 1.450.495.439.490,00 terealisasi sebesar Rp. 1.490.645.884.160,73 atau 102,77%, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target Rp. 125.609.082.670,00 terealisasi sebesar Rp. 129.916.542.579,73 atau 103,43%, sedangkan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 130.480.014.294,38 atau 104,68%,

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bapenda pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 Dengan Target 8,12% terealisasi sebesar 10,83% dengan capaian 133,37%.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 109,46%, ini disebabkan :

Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target antara lain Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak BPHTB sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya yang dikelola oleh Bapenda akan terus diupayakan dan akan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Akhirnya melalui laporan kinerja instansi pemerintah di samping berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government. Selain itu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga bertugas sebagai media pertanggung jawaban penyelenggaraan Negara kepada masyarakat.

Kuala Tungkal, 22 Januari 2024

KEPALA BAPENDA

